

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Perkembangan harga Kabupaten Buton Utara didasarkan pada informasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dikeluarkan secara Bulanan.
2. Harga rata-rata komoditas Daging Sapi, Gula Pasir, Beras dan Minyak Goreng relatif stabil selama 3 (tiga) bulan terakhir dan tidak memiliki gejolak harga yang signifikan.
3. Harga rata-rata komoditas Bawang Merah, Bawang Putih, Cabe Rawit dan Cabe Besar relatif meningkat selama 3 (tiga) bulan terakhir dengan keterangan sebagai berikut.
 - i. Komoditas Bawang Merah naik sebesar Rp. 6.666 atau 10,3 %, kenaikan diperkirakan akibat kurangnya pasokan dan meningkatnya permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru.
 - ii. Komoditas Bawang Putih naik sebesar Rp. 1.666 atau 0,3 %, kenaikan diperkirakan akibat kurangnya pasokan dan meningkatnya permintaan.
 - iii. Komoditas Cabe Rawit naik sebesar Rp. 15.000 atau 22%, kenaikan diperkirakan akibat kurangnya pasokan dan distribusi yang terhambat.
 - iv. Komoditas Cabe Besar naik sebesar Rp. 6.666 atau 10,4%, kenaikan diperkirakan akibat meningkatnya permintaan dan distribusi yang terhambat
4. Harga rata-rata komoditas Jagung dan Daging Ayam relatif menurun selama 3 (tiga) bulan terakhir dengan keterangan sebagai berikut.
 - i. Komoditas Jagung turun sebesar Rp. 500 atau 4%, penurunan diperkirakan akibat panen di beberapa wilayah.
 - ii. Komoditas Daging Ayam turun sebesar Rp. 5.000 atau 5,2%, penurunan diperkirakan akibat panen di beberapa wilayah.

No	Komoditas	Rata-rata harga Okt 2025 (Rp)	Rata-rata harga Nov 2025 (Rp)	Rata-rata harga Des 2025 (Rp)
1	Beras	16.800	17.067	17.067
2	Jagung	12.500	12.500	12.000
3	Bawang Merah	48.333	56.667	63.333
4	Bawang Putih	45.000	46.667	48,333
5	Cabai Besar	66.667	56.667	63.333
6	Cabai Rawit	51.667	51.667	66.667
7	Daging Sapi/Kerbau	140.000	140.000	140.000
8	Daging Ayam Ras	100.000	100.000	95.000
9	Telur Ayam Ras	66.000	66.000	66.000
10	Gula Pasir	18.000	18.000	18.000
11	Minyak Goreng	22.333	23.000	23.000

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kendala yang dihadapi oleh TPID Kabupaten Buton Utara pada pelaksanaan pengendalian inflasi dengan kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) adalah sebagai berikut.

- i. Terbatasnya pasokan beberapa komoditas pada triwulan IV 2025 disebabkan oleh cuaca buruk dan kondisi infrastruktur yang rusak menghambat distribusi.

Kenaikan harga beberapa komoditas dipengaruhi meningkatnya permintaan dan kenaikan harga BBM dan juga menjelang Hari Natal dan Tahun Baru

- iii. Produksi pangan yang tidak merata dan rantai pasok yang tidak efisien akibat infrastruktur pendukung distribusi yang masih terbatas seperti jalan rusak dan cuaca buruk.
- iv. Infrastruktur pendukung yang masih terbatas dan jaringan distribusi yang belum lancar.
- v. Tingginya ketergantungan Kabupaten Buton Utara dengan daerah lain yakni Kota Kendari dan Kota Baubau untuk beberapa Komoditas seperti Gula Pasir dan Minyak Goreng.
- vi. Terbatasnya informasi komoditas pangan strategis Sulawesi Tenggara, seperti (1) informasi surplus dan defisit, (2) informasi pola tanam komoditas, (3) informasi kebutuhan dan konsumsi komoditas strategis untuk mendukung arah kebijakan strategis.
- vii. Kapasitas produksi yang terbatas akibat teknologi yang terbatas.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- i. Rapat rutin TPID Buton Utara bersama OPD terkait membahas Penanganan Inflasi pada tanggal 13 Oktober 2025.
- ii. Pertemuan rutin (via zoom) bersama Mendagri membahas langkah konkret Pengendalian Inflasi Daerah sebagai tindak lanjut dari Arahan Presiden tanggal 24 Oktober 2025.
- iii. Pertemuan rutin (via zoom) bersama Mendagri membahas langkah konkret Pengendalian Inflasi Daerah sebagai tindak lanjut dari Arahan Presiden tanggal 31 Oktober 2025.
- iv. Pertemuan rutin (via zoom) bersama Mendagri membahas langkah konkret Pengendalian Inflasi Daerah sebagai tindak lanjut dari Arahan Presiden tanggal 7 November 2025.
- v. Pertemuan rutin (via zoom) bersama Mendagri membahas langkah konkret Pengendalian Inflasi Daerah sebagai tindak lanjut dari Arahan Presiden tanggal 14 November 2025.
- vi. Pertemuan rutin (via zoom) bersama Mendagri membahas langkah konkret Pengendalian Inflasi Daerah sebagai tindak lanjut dari Arahan Presiden tanggal 21 November 2025.
- vii. Penyerahan Bantuan Perlindungan Sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi pada tanggal 22 November 2025.
- viii. Pertemuan rutin (via zoom) bersama Mendagri membahas langkah konkret Pengendalian Inflasi Daerah sebagai tindak lanjut dari Arahan Presiden tanggal 28 November 2025.
- ix. Pertemuan rutin (via zoom) bersama Mendagri membahas langkah konkret Pengendalian Inflasi Daerah sebagai tindak lanjut dari Arahan Presiden tanggal 5 Desember 2025.
- x. Pertemuan rutin (via zoom) bersama Mendagri membahas langkah konkret Pengendalian Inflasi Daerah sebagai tindak lanjut dari Arahan Presiden tanggal 12 Desember 2025.
- xi. Pertemuan rutin (via zoom) bersama Mendagri membahas langkah konkret Pengendalian Inflasi Daerah sebagai tindak lanjut dari Arahan Presiden tanggal 19 Desember 2025.
- xii. Pertemuan rutin (via zoom) bersama Mendagri membahas langkah konkret
 - ii. Pengendalian Inflasi Daerah sebagai tindak lanjut dari Arahan Presiden tanggal 26

Desember 2025.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- a. Perluasan inovasi kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat yang terdampak akibat tingginya harga komoditas pangan saat ini.
- b. Memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) guna Mengurangi Disparitas pasokan dan harga antar wilayah.
- c. Menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antar daerah.
- d. Perlunya penyesuaian program kerja Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah guna Mengendalikan Inflasi.
- e. Mendorong penguatan sarana dan prasarana produksi pangan untuk mendorong tingginya produksi pangan di wilayah Kabupaten Buton Utara.
- f. Perlunya mengevaluasi kembali jalur perdagangan di wilayah Kabupaten Buton Utara sehingga untuk menentukan skema kerjasama antar daerah ke depan. Jalur perdagangan tersebut termasuk untuk mengurangi keterlibatan agen yang dapat meningkatkan harga.
- g. Perlunya penyesuaian program kerja pemerintah daerah dengan rekomendasi dari pemerintah pusat untuk mengendalikan inflasi.
- h. Perlunya pemantauan harga dan stok berkala untuk mengidentifikasi kondisi harga dan pasokan komoditas strategis. Saat ini harga dan stok sudah tersedia di Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Ketahanan Pangan, namun kurangnya komunikasi menyebabkan informasi belum dapat digunakan secara lebih komprehensif.
- i. Perlunya pendampingan intensif kepada nelayan atau petani untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas komoditas karena saat ini komoditas. Saat ini masih banyak petani atau nelayan yang menanam tanpa melihat kondisi cuaca.
- j. Perlunya penyaluran perlindungan sosial untuk tetap menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga komoditas.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- a. Memperkuat koordinasi antar OPD untuk secara konsisten melakukan pembaharuan data pasokan, kebutuhan, dan harga sehingga dapat menjadi langkah awal dalam menentukan upaya pengendalian kedepan dan memitigasi kemungkinan terjadinya keterbatasan suplai.
- b. Alokasi anggaran untuk penanganan inflasi di Kabupaten Buton Utara sebagai langkah antisipatif peningkatan Inflasi kedepan nya, salah satunya dapat diwujudkan melalui upaya peningkatan produksi komoditas strategis penyumbang inflasi seperti pemanfaatan lahan tidur dan pemberian bantuan bibit.
- c. Memantau keberlanjutan dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) sebagai bentuk pengendalian inflasi secara berkelanjutan.
- d. Mendorong terbentuknya pasar digital untuk mempermudah pemantauan harga dan pasokan secara berkala, serta mereduksi ketimpangan harga antar daerah.
- e. Terus memperkuat sinergi TPID terutama dalam mewujudkan 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) melalui kegiatan sidak pasar, pengembangan komoditas pangan strategis menggunakan teknologi tepat guna, serta pendampingan dan fasilitasi kelompok tani/nelayan untuk meningkatkan produktivitas.

Melaksanakan operasi pasar untuk memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan.